

Peran Media Lokal dalam Pencegahan Radikalisme Guna Mendukung Kerukunan Beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Lestari Nurhajati^{1*}, Xenia Angelica Wijayanto², Lamria Raya Fitriyani³

^{1,2,3} Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR

^{1,2,3} Alamat: Jl. K.H. Mas Mansyur No.Kav. 35, RT.12/RW.11, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
Email : lestari.n@lspr.edu

The Role of Local Media in Preventing Radicalism to Support Religious Harmony In East Nusa Tenggara Province (NTT)

ABSTRACT

Radicalism and terrorism are still common in Indonesia, so all parties have a common obligation to carry out prevention and countermeasures. Even the Press Council issued Press Council Regulation Number 01/Peraturan-DP/IV/2015 concerning Guidelines for Reporting on Terrorism on April 9, 2015. However, it is really not easy for the mass media to report and report on this issue in various situations and interests in Indonesia. Likewise for local media in East Nusa Tenggara (NTT). This study aims to find out how the role of local journalists in NTT is to perform their functions in preventing radicalism and supporting religious harmony in NTT Province. What obstacles they face in the field, as well as what kind of news construction they have to do in carrying out their duties. Mass media, terrorism and radicalism are theories that continue to develop in line with how the discourse of radicalism is inseparable from the role of mass media coverage in encouraging or inhibiting radicalization and existing acts of violence. The position of the media, both at the local, national and global levels, becomes very important in carrying out counter narration when there are efforts by parties who want to promote the idea of radicalism and terrorism in a region. This research will use the FGD method on 10 journalists from local media in NTT, as an effort to dig deeper into the real conditions in the field. However, nowadays with the strengthening of transnational radical groups, they are trying to do various ways to divide Indonesia, and it is very likely that it will be present in NTT as one of the heart of the province which has been considered very ideal in maintaining religious harmony.

Keywords: Journalist; Radicalism; Religious Harmony; Local Media

ABSTRAK

Radikalisme dan terorisme masih sering terjadi di Indonesia, sehingga semua pihak memiliki kewajiban bersama untuk melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Bahkan Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IV/2015 tentang Pedoman Pemberitaan Terorisme pada 9 April 2015. Meski demikian sungguh tidak mudah untuk media massa melakukan peliputan dan pemberitaan isu ini dalam berbagai situasi dan kepentingan yang ada di Indonesia. Demikian juga bagi media-media lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya peran jurnalis lokal di NTT untuk melakukan fungsinya dalam mencegah radikalisme dan mendukung kerukunan beragama di Provinsi NTT. Kendala apa saja yang mereka hadapi di lapangan, serta konstruksi pemberitaan seperti apa yang mereka harus lakukan dalam menjalankan tugasnya. Media massa, terorisme dan radikalisme menjadi teori yang terus berkembang sejalan dengan bagaimana wacana radikalisme tidak terlepas dari peran liputan media massa dalam mendorong atau menghambat radikalisasi dan tindakan kekerasan yang ada. Posisi media baik di tingkat lokal, nasional maupun global, menjadi sangat penting dalam melakukan narasi balasan (*counternarration*) ketika ada upaya pihak-pihak yang ingin mempromosikan gagasan radikalisme dan terorisme di sebuah wilayah. Riset ini akan menggunakan metode FGD pada 10 jurnalis dari media-media lokal yang ada di NTT, sebagai upaya menggali lebih dalam kondisi riil yang ada di lapangan. Bagaimanapun juga saat ini dengan makin menguatnya kelompok radikal yang bersifat transnasional, mereka berupaya melakukan berbagai cara untuk memecah belah Indonesia, dan sangat mungkin hadir di NTT sebagai salah satu jantung provinsi yang selama ini dianggap sangat ideal dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Kata kunci: Jurnalis; Radikalisme; Kerukunan Beragama; Media Lokal

LATAR BELAKANG

NTT selalu disebut-sebut sebagai salah satu provinsi yang berhasil menjaga kerukunan umat beragama. Meskipun demikian potensi terjadinya kekerasan, pertikaian maupun konflik atas nama agama pernah hadir beberapa kali di NTT. Beberapa di antaranya adalah Kerusuhan Kupang pada tahun 1998, Konflik Lembata 2010, kemudian Penyerangan 7 Siswa SD NTT tahun 2018, dan Konflik Tanah di Manggarai. Beberapa konflik di atas ada beberapa yang bisa diredam oleh para pemuka agama maupun tokoh masyarakat dengan dukungan pemberitaan di media yang bersifat positif. Namun ada yang tidak bisa dikendalikan, sehingga menimbulkan kondisi yang cukup serius. Pada beberapa kasus konflik tersebut terjadi antar kelompok pemeluk agama Islam dan Non Islam. Situasi tersebut tentu perlu mendapat perhatian, terlebih saat ini kelompok radikal atas nama agama Islam, makin banyak dan menguat di Indonesia (Riyanta, 2022).

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian dalam Negeri mencatat penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) berjumlah 5,49 juta jiwa pada akhir 2021. Dari jumlah tersebut kemudian tercatat jumlah pemeluk agama Katolik sebanyak 2,94 juta jiwa, Kristen 1,9 juta jiwa, Islam 514 ribu jiwa, Hindu, Budha, Konghucu, Kepercayaan Merapu dan lainnya, kurang lebih 46 ribu jiwa (Kusnandar, 2022). Keragaman pemeluk agama dan kepercayaan di NTT ini menjadi salah satu kekuatan provinsi ini yang oleh berbagai pemberitaan berskala nasional, NTT selalu disebut-sebut sebagai salah satu provinsi yang berhasil menjaga kerukunan umat beragama. Meskipun demikian potensi terjadinya kekerasan, pertikaian maupun konflik atas nama agama pernah hadir beberapa kali di NTT. Beberapa di antaranya adalah Kerusuhan Kupang pada tahun 1998, Konflik Lembata 2010, kemudian Penyerangan 7 Siswa SD NTT tahun 2018, dan Konflik Tanah di Manggarai. Beberapa konflik di atas ada beberapa yang bisa diredam oleh para pemuka agama maupun tokoh masyarakat dengan dukungan pemberitaan di media yang bersifat positif. Namun ada yang tidak bisa dikendalikan, sehingga menimbulkan kondisi yang cukup serius. Pada beberapa kasus konflik tersebut terjadi antar kelompok pemeluk agama Islam dan Non Islam. Situasi tersebut tentu perlu mendapat perhatian, terlebih saat ini kelompok radikal atas nama agama Islam, makin banyak dan menguat di Indonesia (Riyanta, 2022)

Pada tahun 2020 penelitian yang dilakukan Ravo, Daven dan Maku menemukan bahwa bibit-bibit radikalisme juga menguat di kalangan anak muda Islam di NTT. Penelitian tersebut menyebarkan kuesioner pada 220 orang mahasiswa Islam yang tersebar pada 5 perguruan tinggi terbesar di NTT yakni Universitas Nusa Cendana - Kupang, Universitas Katolik Widya Mandira - Kupang, Universitas Kristen Artawacana - Kupang, Universitas Flores - Ende, dan Universitas Nusa Nipa - Maumere. 32% dari responden menunjukkan sikap radikal terhadap keyakinan yang berkaitan dengan Islamisme. Sikap yang ditunjukkan sebagai radikal dalam hal ini adalah kepercayaan bahwa orang yang bukan Muslim adalah kafir/kufur. Pada konteks penelitian tersebut, hal ini menjadi perhatian karena para responden umumnya hidup di tengah mayoritas penduduk dengan agama Katolik dan Kristen Protestan. Selanjutnya, sebesar 15.1 % responden yang menginginkan adanya penggantian dasar negara Pancasila menjadi syariat Islam. Hampir 10% responden membenarkan dilakukannya pembunuhan atas nama jihad. Kondisi ini tentunya perlu diwaspadai berbagai pihak, baik pemerintah, kalangan akademisi, pemuka agama, dan juga masyarakat umum.

Radikalisme dan terorisme masih sering terjadi di Indonesia, sehingga semua pihak memiliki kewajiban bersama untuk melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Bahkan Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/IV/2015 tentang Pedoman Pemberitaan Terorisme pada 9 April 2015. Dijelaskan bahwa radikalisme merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pelibatan semua pihak termasuk media untuk mencegahnya. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa media massa di Indonesia harus bekerja melawan terorisme. Pedoman tersebut mencakup tiga belas item yang harus diikuti oleh jurnalis sebagai aturan dalam melaporkan berita tentang radikalisme dan terorisme. Meski demikian sungguh tidak mudah untuk media massa melakukan peliputan dan pemberitaan isu ini dalam berbagai situasi dan kepentingan yang ada di Indonesia. Demikian juga bagi media-media lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Meskipun dalam berbagai pemberitaan berskala nasional, NTT selalu disebut-sebut sebagai salah satu provinsi yang berhasil menjaga kerukunan umat beragama, namun berbagai peristiwa yang mengoyak isu kerukunan itu hadir secara riil di NTT.

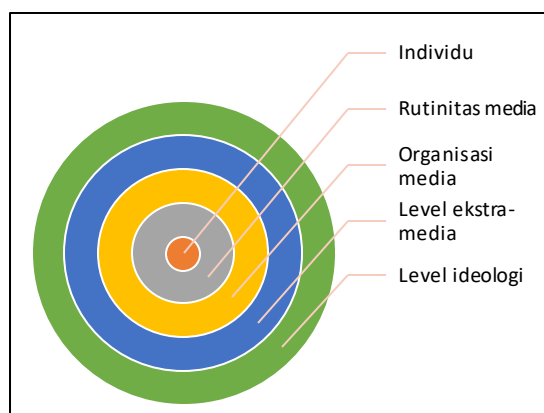
Tidak bisa dipungkiri, pada akhirnya media massa, termasuk media online lokal memiliki peran penting dalam isu perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Hal ini terbukti juga ketika ada beberapa kasus yang berpotensi menimbulkan konflik antar agama, kemudian bisa diredam dengan pemberitaan media yang bersifat mendamaikan. Salah satu contohnya adalah kasus konflik agama di Tolikara, Papua, yang kemudian Tempo.co menuliskan dengan pendekatan jurnalisisme damai, sehingga bisa meredam konflik yang sempat terjadi dengan kuat (Juditha, 2016). Menyajikan informasi dan pemberitaan yang tidak memperkeruh situasi, namun justru menyejukan. Untuk itu penelitian ini kemudian ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya peran jurnalis lokal di NTT untuk melakukan fungsinya dalam mencegah radikalisme dan mendukung kerukunan beragama di

Provinsi NTT. Kendala apa saja yang mereka hadapi di lapangan, serta konstruksi pemberitaan seperti apa yang mereka harus lakukan dalam menjalankan tugasnya.

Di berbagai wilayah maupun negara yang memiliki konflik, maupun perang, masyarakatnya tentu saja membutuhkan juru damai yang mampu meredakan kondisi konflik tersebut. Salah satu yang dianggap mampu meredakan konflik adalah para jurnalis dan media yang berada di wilayah konflik. Sehingga kemudian muncul konsep tentang jurnalisme damai yang oleh (Lynch, 2015) didefinisikan sebagai sebuah kondisi ketika editordan reporter membuat pilihan - tentang apa yang akan dilaporkan, dan bagaimana melaporkannya - yang menciptakan peluang bagi masyarakat luas untuk mempertimbangkan dan menghargai tanggapan non-kekerasan terhadap konflik. Namun demikian tentu saja tidak mudah dalam prakteknya jurnalisme damai ini dipraktekan. Tidak hanya karena persoalan media yang memiliki kepentingan tersendiri, namun juga persoalan yang barangkali dimiliki oleh para jurnalisnya, termasuk kapasitas dan kompetensinya saat melakukan liputandi wilayah konflik (Jamil & Sohal, 2021; Youngblood, 2016).

(Nurhajati et al., 2018) menyatakan bahwa pada hakikatnya, jurnalis profesional adalah pekerja intelektual, sama seperti peneliti atau ilmuwan. Mereka memulai pekerjaannya dari pemikiran kritis mengenai suatu fenomena dalam masyarakat, lalu mencari jawabannya melalui investigasi atau wawancara mendalam untuk kemudian diseleksi dan disebarkan bagi kepentingan masyarakat (Banderov et al., 2016; Nurhajati et al., 2018) dalam menjalankan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi, jurnalis memiliki banyak permasalahan. Inkonsistensi antara kepatuhan yang sangat besar dengan pemilik media, dan tuntutan untuk menulis atas nama kepentingan Publik menyebabkan pada praktiknya hanya sedikit media yang benar-benar mengakomodasi kepentingan publik.

Jurnalis sebagai ujung tombak pembentukan persepsi masyarakat tidak dapat bergerak sendiri. Sering kali pergerakannya dipengaruhi oleh banyak hal seperti digambarkan melalui Teori hirarki pengaruh isi media oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (1996). Teori ini menjelaskan bahwa isi dari suatu pemberitaan media dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Shoemaker dan Reese membagi pengaruh isi media menjadi beberapa level, yakni pengaruh dari individu pekerja media (*individual level*), pengaruh dari rutinitas media (*media routines level*), pengaruh dari organisasi media (*organizational level*), pengaruh dari luar media (*outside media level*), dan pengaruh ideologi (*ideology level*).



Gambar 1. Hirarki Pengaruh Media Shoemaker & Reese, (2013)

Shoemaker dan Reese melihat bahwa isi pesan media yang disampaikan kepada khalayak merupakan hasil pengaruh dari kebijakan internal berbagai level dalam organisasi media mulai dari rapat redaksi, pengaruh para pembuat keputusan yang lebih tinggi seperti direksi media, pengaruh diluar media itu sendiri, juga pengaruh dari ideologi yang dianut oleh masing-masing pihak terkait. Dalam hal ini pengaruh internal media pada konten media berhubungan erat dengan kepentingan dari pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, serta rutinitas organisasi media. Faktor eksternal juga berpengaruh pada konten media yang dihasilkan. Faktor eksternal tersebut berhubungan dengan para pengiklan dan pemerintah, juga masyarakat (Beckert, 2022; Soekowati, 2018).

Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi isi media menyebabkan jurnalis menjadi pihak yang terjepit dalam hal ini. Posisi jurnalis yang terus berjuang untuk mempertahankan dan memulihkan kebebasan mereka dari pihak-pihak yang ingin membungkam mereka memperlihatkan bahwa ini adalah pertarungan antara transparansi dan kerahasiaan, hak rakyat untuk tahu dan keinginan para diktator untuk mengontrol aliran berita dan informasi (Hamada, 2021; Nyarko & Akpojivi, 2017).

Istilah “radikalisme” berasal dari kata “radix” yang berarti akar, pangkal dan bawah, atau bisa juga menyeluruh, habis-habisan dan sangat sulit untuk perubahan permintaan. Secara terminologis, itu berartialiran pemikiran atau ideologi radikal terhadap tatanan politik; memahami itu dengan kuat menuntut perubahansosial dan politik dalam suatu negara (Zuhdi, 2019). Sementara itu konsep terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan dengan beberapa cara seperti ancaman, intimidasi, pembajakan hingga peledakan bom. Yang terakhir (peledakan bom) merupakan cara yang paling sering digunakan (Alexandra, 2017). Merujuk pada konsep dan definisi di atas, maka secara umum dipahami bahwa penganut paham radikalisme kemudian berpotensi untuk melakukan Tindakan terorisme.

Kelompok teroris ini kemudian tidak hanya melakukan aksinya secara langsung di lapangan, namun juga seringkali menggunakan media sebagai salah satu sarana untuk menyebarkan teror. Beberapa penelitian menunjukan betapa ada hubungan saling menguntungkan antara media dengan terorisme. Peran media dalam hubungan simbiosis dengan terorisme dapat bervariasi. Sementara media entah bagaimana selalu dikaitkan dengan gagasan bahwa mereka seolah mendukung terorisme, cara-cara di mana mereka benar-benar dapat membantu teroris dalam memajukan suatu tujuan dapat mengambil bentuk yang berbeda. Media dapat mendorong terorisme melalui "penularan", idenya adalah bahwa perhatian media terhadap teror akan mendorong insiden lebih lanjut dengan memberikan "model dan inspirasi" untuk lebih banyak serangan. Media dapat “mendukung” terorisme dengan meromantisasi atau mengagungkannya (Archetti, 2012). Hal serupa juga dikemukakan oleh (Altheide, 2007), bahwa media seringkali secara langsung dan tak langsung, secara sadar dan tak sadar, media massa mempromosikan terorisme dengan menekankan ketakutan dan masa depan yang tidak pasti.

Untuk itu menjadi sangat signifikan, media massa, dalam hal ini media online dan media cetak pun dituntut untuk lebih berhati-hati dalam setiap pemberitaan yang berkaitan dengan isu radikalisme dan terorisme. Di sisi lain media juga tetap dituntut menyampaikan pemberitaan yang berimbang, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat umum serta mendukung perdamaian dan keamanan masyarakatnya.

Media massa kemudian banyak dituntut untuk melakukan tugasnya, yakni salah satunya sebagai pilar penjaga demokrasi. Meskipun di sisi lain tidak terelakan bahwa media massa juga memiliki kepentingan ekonomi, terutama pada sisi pemilik dan pengelola medianya.

Untuk itu menjadi penting bagi berbagai pihak memahami karakteristik media massa saat ini. (Cangara, 2015) menggambarkan beberapa karakteristik media massa yaitu; bersifat melembaga, bersifat satu arah, meluas, penggunaan peralatan secara teknis. Bersifat terbuka. Adapun fungsi dari media massa adalah; fungsi informasi, sebagai penyebar informasi ataupun berita kepada pembaca, pendengar maupun penontonnya, fungsi Pendidikan media massa sebagai sarana yang memberikan edukasi kepada publik melalui setiap informasi maupun tayangan yang diberikan, fungsi mempengaruhi dimana media massa dilakukan secara implisit didalam setiap informasi maupun tayangan yang disampaikan.

Adapun fungsi dari media massa adalah; fungsi informasi, sebagai penyebar informasi ataupun berita kepada pembaca, pendengar maupun penontonnya, fungsi Pendidikan media massa sebagai sarana yang memberikan edukasi kepada publik melalui setiap informasi maupun tayangan yang diberikan, fungsi mempengaruhi dimana media massa dilakukan secara implisit didalam setiap informasi maupun tayangan yang disampaikan.

Disinilah media massa kemudian bisa menjalankan proses membangun narasi maupun sebaliknya melakukan proses counter narasi, apabila dirasakan informasi yang beredar di publik akan membawa dampak buruk bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Menurut (Halverson et al., 2011) menyatakan bahwa counter narasi merupakan alternatif yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pendengar dalam melakukan komunikasi untuk dapat mencapai maksud dan tujuannya. Counter narasi dilakukan sebagai pencegahan setiap pendengar maupun pembaca informasi maupun berita, tidak langsung terpengaruh oleh narasi ekstremis, termasuk dalam melakukan pencegahan terhadap konflik kekerasan ditengah-tengah masyarakat.

Counter Narasi adalah wujud dari keputusan dan keinginan pembacanya dalam mempertanyakan narasi yang dianggap tidak adil dan membentuk narasi lainnya yang dianggap adil. Para pembaca maupun masyarakat yang menjadi konsumsi setiap informasi maupun berita yang disampaikan oleh media massa memerlukan sikap aktif dalam membuat konter narasi dalam menghadapi narasi radikalisme maupun narasi intoleransi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Setelah melihat beberapa penelitian sebelumnya yang melihat fungsi jurnalis, jurnalis perdamaian, juga tentang counter narasi, maka riset ini diharapkan mampu melihat bagaimana peran jurnalis dalam isu perdamaian di NTT.

METODE

Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis, yakni penelitian yang menekankan pentingnya memahami pengalaman dan gagasan dari subjek penelitian (informan) secara individual (Patton, 2014). Sementara itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui *focus group discussion* (FGD). Dalam pendekatan kualitatif, FGD sering digunakan sebagai cara mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh data yang kuat dari kelompok individu yang dipilih secara sengaja, bukan dari perwakilan populasi lebih luas secara statistik. Meskipun penerapan metode ini dalam penelitian media telah sering digunakan, namun tidak ada penilaian kritis terhadap penerapan teknik tersebut. Sehingga untuk penelitian ini pun akan menggunakan metode FGD.

Salah satu tujuan yang diungkapkan dari FGD adalah untuk belajar lebih banyak tentang sikap dan pendapat yang ada dari berbagai individu. Meskipun bagi orang lain, kriteria yang lebih penting adalah kapasitas untuk belajar tentang nilai-nilai yang didapatkan dari FGD itu sendiri. Metodologi FGD memberikan penekanan pada analisis tematik data. Biasanya norma-norma sosial yang tak terucapkan, harapan, dan pemahaman budaya yang muncul dari analisis yang lebih dalam, pada pertukaran percakapan yang terjadi dalam kegiatan FGD tersebut. FGD menawarkan 'isi serta ekspresi' para peserta FGD (Massey, 2011). Kegiatan dilakukan secara virtual melalui zoom meeting, dengan 10 peserta yakni editor dan jurnalis dari : Beritabuana.co, Harian Pagi Pos Kupang, Harian Pos Kupang online, Jubir.id, Katantt.com, NTTNEWonline, Okezone.com (Biro Flores), Harian Timor Express, nttterkini.id.

Topik FGD dilaksanakan terkait dengan bagaimana peran jurnalis lokal di NTT untuk melakukan fungsinya dalam mencegah radikalisme dan mendukung kerukunan beragama di Provinsi NTT. Kemudian kendala apa saja yang mereka hadapi di lapangan, serta konstruksi pemberitaan seperti apa yang mereka harus lakukan dalam menjalankan tugasnya.

HASIL DAN DISKUSI

Media, Jurnalis dan Radikalisme

Media di Indonesia sering dipandang dalam persimpangan, karena tak jarang mereka seolah tidak sadar digunakan sebagai alat oleh beberapa kelompok kepentingan atas nama agama untuk membalikan logika keberagaman/pluralisme. Munculnya para politisi muslim konservatif di Indonesia yang siap dan penuh semangat merangkul media dan teknologi komunikasi baru sambil menggunakan fasilitas negara dan hak prerogatif untuk memajukan visi dan agenda agama konservatif, yang cenderung intoleran dan menuju arah radikalisme sering hadir di media-media Indonesia (Hamayotsu, 2013).

Keberadaan NTT yang dikenal sebagai wilayah penuh damai, dan kerukunan beragama menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari, menjadikan para awak media sangat merasa tidak mungkin adanya upaya-upaya pihak tertentu untuk meyebarkan isu radikalisme di NTT. Hal tersebut disebut oleh 7 dari 9 jurnalis/editor yang mengikuti FGD. Jurnalis A dari Okezone.com menyatakan dengan tegas:

"NTT itu, cukup kuat untuk di gerogoti oleh paham paham radikal itu,tidak ada lagi hal yang bisa dijadikan isu agama itu untuk memecah belah itu yang pertama, yang kedua kekerabatan dan kekeluargaan kita di disini cukup kuat, ... Sehingga dari pertanyaan pertama tentang apakah mungkin? bagi saya tidak mungkin"

Hal senada juga diyakini oleh Jurnalis B, dari Jubir.id yang menjelaskan betapa sangat kuatnya kerukunan beragama dan toleransi di NTT :

"Kerukunan umat beragama yang ada di NTT, saya sebagai jurnalis untuk terkait dengan toleransi di Nusa Tenggara Timur sangat meyakini. Istilah-istilah Nusa Terindah Toleransi – NTT- ada istilah begitu itu yang kami pegang. Tidak hanya kerukunan antar umat beragama Kristen, Katolik da Islam, tapi juga pada agama asli yang ada di Pulau Sumba, yakni yang menganut aliran kepercayaan Marapu....beberapa tahun yang lalu, tahun 98 itu sempat terjadi ada upaya memecah belah persatuan, tapi sejak itu tidak pernah ada lagi"

Pernyataan serupa juga dengan sangat mendalam dijabarkan oleh jurnalis dari Katantt.com, C, yang sangat tegas menekankan situasi damai dan rukun di NTT:

“...damai di NTT itu itu sudah berlangsung dalam kehidupan keseharian kami di NTT. Kalau soal rumah ibadah atau soal toleran itu dalam banyak hal itu sudah, ah apa ya sudah kami praktekan dalam contohnya dalam kehidupan beragama saat perayaan hari besar keagamaan. Seperti kemarin itu hari Raya Lebaran dan Hari Raya Paskah yang waktunya bersamaan itu teman-teman muslim meskipun sementara puasa tapi ikut mengamankan rumah-rumah saat berlangsungnya Paskah Begitupun sebaliknya saat-saat lebaran malam takbiran teman-teman dari kristen membantu membantu menjaga rumah-rumah yang beragama muslim sehingga berlanjut dalam dalam setiap selain praktek itu berlanjut”

Meski secara umum jurnalis/editor lainnya juga menyatakan tentang tidak mungkinnya upaya radikalisme masuk ke NTT, namun salah seorang editor Harian Pagi Pos Kupang (Cetak) - M menyatakan bahwa bagaimanapun juga teman-teman media, baik itu jurnalis maupun editor, harus waspada:

“...sejauh ini saya melihat memang kerukunan di NTT terjaga dan terawat dengan baik, namun bukan tidak mungkin, ketika mungkin ada kelompok-kelompok radikal itu meihat potensi untuk memecah belah. ...Kita kan nggak tahu sejauh mana kekuatan mereka atau kelompok lai, tersebut, tapi paling tidak Ketika kita melihat dan kita sudah yakin bahwa kita tidak akan terpecah dengan apa yang sudah kita jalanin selama ini, sudah bertahun-tahun, maka kita bersuaha kuat menjaganya. Namun sekali lagi bukan tidak mungkin ada perpecahan di antara kita di sini”.

Sikap kritis M ini juga didukung oleh N, yang berasal dari media yang sama, namun merupakan jurnalis pada media onlinenya. Bagaimanapun juga sikap kritis sekaligus skeptis, tetap harus dimiliki oleh para jurnalis dan editor di media.

Sikap kritis dan waspada ini menjadi penting diperhatikan oleh para jurnalis dan media di media lokal NTT, hal ini berkaitan dengan makin banyaknya pondok pesantren yang tidak tercatat di departemen agama. Selain itu korelasi antara terorisme dan komitmen organisasi keagamaan dan aktor teroris telah menjadi subjek penyelidikan ilmiah yang ekstensif. Sementara fokusnya sering kali pada terorisme Jihadis ekstrem, kelompok teroris dan individu lain dengan komitmen agama telah dibahas secara luas (Ravenscroft, 2019).

Di sisi lain media massa, termasuk media online memiliki peran penting dalam isu radikalisme. Setiap orang bebas mengakses sumber berita di media online. Melalui media maya, kejadian konflik di sebuah tempat dapat diberitakan saat itu juga ke tempat lain. Media juga berpotensi mengaburkan realita yang terjadi di lapangan serta membelokkan sesuai dengan ideologi dan nilai ekstrim lainnya. Hal ini menyebabkan radikalisasi diri dapat bertumbuh besar (Zamzamy, 2019). Sehingga menjadi penting memperhatikan bagaimana peran media massa, termasuk media online di media-media lokal NTT, ketika berkaitan dengan isu radikalisme yang muncul di wilayah NTT.

Jurnalisme Perdamaian

Nilai toleransi dan penghargaan atas keberagaman dan perbedaan, termasuk pada perbedaan agama, menjadi nilai-nilai utama bagi masyarakat NTT secara umum. Meskipun demikian tidak bisa diungkiri tetapada potensi perpecahan antar umat beragama, seperti yang tercatat dalam sejarah NTT. Salah satu peristiwa yang cukup mengejutkan masyarakat NTT, terutama masyarakat Kota Kupang, yaitu terjadinya kerusuhan di kota ini pada tanggal 30 Nopember 1998. Peristiwa yang memakan korban harta benda yang tidak sedikit ini mengusik kehidupan masyarakat yang selama ini tergolong rukun dan damai di Kupang, bahkan di NTT pada umumnya (As'ad, 2018). Termasuk juga adanya konflik yang terjadi di dua wilayah Rote Ndao. Dua Kecamatan di Rote Ndao yang Rawan konflik Agama tersebut adalah kecamatan Rote Tengah dan Rote Barat laut. Konflik agama tersebut dikarenakan adanya penyiaran, perebutan dan perpindahan jemaat di antara gereja kristen dan gereja-gereja denominasi (RoteNdao, n.d.)

Jurnalisme perdamaian bisa dilihat mendalam apabila para jurnalisnya berorientasi perdamaian/penyelesaian konflik. Untuk itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yakni: a. Mendalami pembentukan konflik. b. Ruang terbuka, waktu terbuka; penyebab dan hasil. c. Membuat konflik transparan. d. Memerlihatkan ketegasan, dan sekaligus pengertian. e. Memberikan suara kepada semua pihak. f. Fokus pada kreativitas dan penyelesaian konflik. g. Humanisasi pada semua pihak. h. Proaktif, pencegahan sebelum

kekerasan/perang terjadi. Fokus pada efek kekerasan yang tidak terlihat (trauma dan kemuliaan, kerusakan struktur/Budaya). Termasuk juga para jurnalisnya berorientasi pada kebenaran dengan cara mengekspos ketidakbenaran di semua sisi, serta menemukan semua yang ditutup-tutupi (Galtung, 2003).

Sikap dan Tindakan jurnalis yang berorientasi pada perdamaian juga tampak pada hampir semua jurnalis NTT yang menjadi peserta FGD. Salah satunya seperti pernyataan jurnalis senior D, dari media NTTNEWonline.com

"...beberapa tahun lalu, saya lihat hampir semua media tidak berani menulis tentang pembangunan masjid di batuplattan, Kupang, namun kami terlibat dan bagaimana apa kita menggunakan perspektif keberagaman dan beragama, bahwa mempunyai tempat ibadah itu adalah sebuah hak asasi yang dimiliki semua orang dan dalam menulis ini kita tetap mengangkat fakta bahwa ada sekelompok masyarakat yang memprotes. Tetapi kita juga mewawancarai pihak-pihak yang turun tangan mempromosikan perbedaan dan juga kami mewawancarai pihak-pihak yang paham adanya aturan-aturan bersifat diskriminatif"

Tidak hanya jurnalisnya yang diharapkan memiliki kemampuan jurnalisisme damai, namun juga kebijakan redaksinya, beberapa media menetapkan soal jurnalisisme damai ini. Seperti salah satu pernyataan Redaktur Harian Pos Kupang, M:

"...Kebijakan redaksi kita ketika kita penerimaan wartawan baru, dalam salah satu materi untuk wartawan yang baru itu Kami memasukkan tentang bagaimana peliputan untuk isu-isu keberagaman gender dan seksualitas termasuk bagaimana untuk menulis berita-berita dengan perspektif jurnalis damai. Wartawan Pos Kupang sudah bisa memegang isunya dengan baik ketika melakukan peliputan. Ketika kemudian di lapangan mereka kemudian menghasilkan berita dan ceritanya agak sedikit tercermin bahwa belum berperan aktif keberagaman, maka kami di kelompok redaksinya mengamankan dalam tanda kutip, bukan menganulir berita itu tetapi bagaimana kembali ke wartawannya untuk menambah berita itu sehingga bisa menjadi berita yang efektif jurnalis damai dan keberagaman"

Pernyataan serupa juga disampaikan jurnalis sekaligus editor Katantt.com, C:

"...untuk untuk untuk menjaga toleransi, soal menjaga keberagaman ini jadi dalam hal pemberitaan maka semualtu, sangat-sangat bergantung kebijakan redaksional masing-masing. Di media kami itu sudah sudah ada untuk tetap merawat dan menjaga keberagaman ini"

Dari berbagai pernyataan para jurnalis dan editor media lokal yang ada di NTT menunjukkan upaya sangat keras sudah dilakukan oleh berbagai media lokal tersebut untuk menjalankan jurnalisisme damai. Meskipun begitu berbagai pelatihan dan pendalaman tentang isu jurnalisisme damai masih terus mereka butuhkan. Beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan atas dukungan dan Kerjasama berbagai pihak, misalnya AJI (Aliansi Jurnalis Independen), juga SEJUK (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman) pernah dilakukan di NTT, namun dari sisi kuantitas dirasakan masih terlampau jarang. Seperti juga pernyataan jurnalis sekaligus editor M, dari Harian Pos Kupang :

"Sebenarnya sudah pernah ada, tapi dulu ya...dan pesertanya juga sangat terbatas, nah sekarang jurnalis-jurnalis Junior, yang muda-muda ini tentu juga membutuhkan pelatihan serupa. Karena yang dulu ikut kan sudah para senior"

Pentingnya berbagai pelatihan tentang isu keberagaman lebih sering dilakukan juga disampaikan T, dari Timor Ekpress :

“Saya waktu awalnya perlu mengikuti kegiatan-kegiatan serupa, seperti bicara soal Ahmadiyah. Kita memang masih memerlukannya tapi ketika perkembangan pelatihan macam-macam keberagaman itu sedikit. Coba kita bisa dipercaya melakukan diskusi dan pelatihan keberagaman lebih banyak, akan lebih bagus. Penting untuk kita jaga, soal beragamnya kepercayaan dan lain-lain itu menyangkut dengan hal-hal yang pribadi masing-masing. Harapan kita kedepan bisa lebih untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak jurnalis”

Media dan Counter Narasi

Upaya melakukan counter narasi apabila ada kondisi yang dianggap rawan dan memunculkan konflik, maka para jurnalis dan editor di NTT menyadari perlunya melakukan proses yang meredam konflik dengan tidak menonjolkan konflik itu sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Jurnalis Okezone.com, A, yang memang asli orang Kupang dan ditempatkan di wilayah NTT:

“Berangkat dari pemahaman kita sebagai jurnalis, kita menganggap perkelahian atau konflik yang kebetulan Si A dan si B beda agama, maka kita tidak akan mau untuk amplifikasi atau membesar-besarkan, karena ini menunjukkan maka bagi saya itu juga justru memperuncing masalah. Sehingga media memang harus punya perspektif yang bisa menjadi pelindung, bukan menjadi ancaman, bukan mengamplifikasi sebuah konflik. Kita harus meredamnya”

Hal senada juga disampaikan jurnalis senior D, dari media NTTNEWonline.com:

“Waktu itu dengan teman-teman komunitas orang muda lintas agama ada beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat yang punya perspektif baik sekali itu diwawancarai. Dan dianjurkan para tokoh ini untuk menulis opini seperti itu. Jadi faktanya tetap dituliskan. Kalau kita media mainstream tidak menulis dan ini diambil alih oleh media sosial lebih runyam karena isinya akan dibelokkan dan semakin liar jadi kita, media mainstream yang punya perspektif keberagaman yang baik yang harus menang tapi ini tidak boleh menghindar tetapi cara melihat kita melihat dari perspektif keberagaman dan hak asasi Semua orang berhak memilih agama dan berhak juga mempunyai tempat ibadah itu. Jadi kami redaksi tidak saja memberitakan, tapi juga mengedukasi, termasuk pada kelompok minority untuk selalu menggunakan pendekatan dialog kultural dalam kegiatannya”

N, jurnalis dari Harian Pos Kupang menyampaikan hal senada:

“...Saya pernah mendengar informasi ada hal-hal yang agak sensitif di NTT, tetapi kami tentu saja tidak menjual isu itu ke publik. Kita sebagai media tidak mungkin ikut memprovokasi. Kita justru akan menulis dengan pemahaman-pemahaman yang lebih baik, agar tidak terjadi gesekan-gesekan di antara teman-teman mayoritas dan minoritas yang ada di sini”

Upaya untuk melakukan counter narasi di media online, termasuk media sosial menjadi penting untuk melawan radikalisme yang tumbuh di dunia maya maupun dunia nyata (Rustandi & Muchtar, 2020). Hasil jajak pendapat Kompas April 2021, sebanyak 40,6 persen responden menilai internet dan media sosial paling berpengaruh dalam membuat seseorang menjadi radikal dan memiliki gagasan terlibat terorisme. Faktor ideologi menempati urutan kedua (Basyari, 2021)

Proses melakukan counter narasi dari pihak media ini tentu saja memerlukan dukungan dan kebijakan media secara penuh. Bagaimanapun juga jurnalis meskipun garda terdepan media, mereka tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Hal ini dikarenakan kebijakan redaksi masih menjadi panglima utama saat sebuah isu diliput dan diberitakan.

Ruang Redaksi dan Intervensi Bisnis

Pada akhirnya keberadaan berita tidak bisa lepas dari konteks hubungan antara isi berita, kebijakan redaksi, intervensi pemilik media maupun pemasang iklan. Seperti juga pengakuan salah seorang jurnalis di NTT yang mengaku beberapa kali menuliskan isu keberagaman sebagai bentuk menjadi toleransi dan perdamaian di NTT, namun dia juga tidak bisa mengelak bahwa upaya promosi tersebut tidak bisa banyak dilakukan karena berbagai keterbatasan jurnalis. Misalnya saja dari sisi waktu, jurnalis di beberapa media lokal NTT juga mendapatkan kewajiban "menyetor" artikel tulisan dalam jumlah tertentu ; antara 3-8 berita per hari. Persoalan jumlah "setoran" target berita setiap hari, tampak kuat pada berbagai media online, hal ini juga menjadi temuan dalam riset tentang Inovasi Bisnis Model Industri Media Online di Indonesia (Nurhajati & Wijayanto, 2022) . Jurnalis media online menjadi diburu-buru memenuhi jumlah berita dalam waktu yang singkat. Keterbatasan waktu dan pengetahuan atas isu keberagaman, anti radikalisme, dan memperkuat toleransi ini masih menjadi persoalan di banyak jurnalis yang bertugas meliput langsung di lapangan.

Namun demikian, nilai positif yang bisa didapatkan dari temuan lapangan ini adalah: media-media lokal di NTT yang diteliti, menyatakan mereka tidak pernah mendapatkan intervensi dari pemasang iklan untuk isu peliputan perdamaian dan peningkatan toleransi. Sebuah kondisi yang menimbulkan optimism pada teman-teman jurnalis lokal di NTT. Hal ini berbeda dengan hasil riset (Ritonga, 2021) yang melakukan penelitian di Kota Medan, dan menemukan bahwa perusahaan pers di sana mengikat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyiarkan berita-berita advertorial tanpa pembeda dengan berita nonadvertorial. Mereka menyiarkan berita berbayar berdasarkan kepentingan pemberi kontrak, sehingga pers tidak lagi independen dalam menjalankan fungsi jurnalisisme. Praktik-praktik pemberitaan seperti itu dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap ruang redaksi dan tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Sementara untuk isu intervensi pemilik media, salah seorang redaksi media Timor Express , T, menyampaikan:

"Di Timor Express, pemilik media sama sekali tidak intervensi soal pemberitaan, wilayah redaksi terpisah dengan campur tangan para pemasang iklan dan juga pemilik media. Redaksi memiliki kebebasan untuk pengembangan konten beritanya tidak ada campur tangan dari pemilik media dan pemasang iklan"

M, redaksi Harian pagi Pos Kupang menuturkan hal yang hampir mirip dengan redaksi Timor Express, namun sedikit ada perbedaannya:

"Sebetulnya hampir sama dengan Timor Express, secara umum tidak ada campur tangan soal keredaksian dari pemilik maupun pemasang iklan. Namun soal keberagaman dan perdamaian, pemilik kami terdahulu, yang sudah wafat, justru selalu terlibat dan mengingatkan kami untuk aktif menuliskan dan menurunkan berita tentang isu pentingnya menghargai yang berbeda, toleransi, dan juga perdamaian. Bahkan setelah pemilik wafat dan diteruskan ke pemilik berikutnya, isu perdamaian ini terus yang diutamakan"

Pada situasi yang disampaikan oleh M di atas terlihat, bahwa sesungguhnya kemungkinan intervensi pemilik ada, namun sejauh sifatnya positif dan untuk kepentingan keberagaman, tampak ditolerir oleh pihak pengelola media dan redaksi secara menyeluruh.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan temuan lapangan di atas maka ada beberapa hal yang bisa menjadi simpulan penelitian ini. Isu utama adalah media lokal di NTT, baik online maupun cetak memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai persatuan, perdamaian, toleransi dan keberagaman di NTT. Namun demikian tampak jurnalis dan redaksi di media lokal NTT, cenderung percaya diri bahwa tidak mungkin NTT dijadikan tempat untuk kemungkinan bersarang dan berkembang paham radikalisme. Tentu saja kepercayaan diri berlebihan bisa menjadi boomerang apabila tidak ada kewaspadaan dari para jurnalis dan para editor media.

Jurnalisisme perdamaian secara praktek sudah diterapkan oleh berbagai media lokal di NTT, termasuk menempatkan jurnalis untuk melakukan proses peliputan di tempat ibadah, yang berbeda dengan keyakinan sang jurnalis. Sebuah praktek kerja yang perlu terus dijalankan dan bila perlu, dijadikan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dari berbagai peristiwa terdahulu, saat ada upaya memecah belah masyarakat NTT dengan isu SARA, media lokal sangat cepat mengantisipasi dengan melakukan counter narasi atas isu tersebut. Artinya counter narasi sudah cukup berhasil dijalankan oleh jurnalis dan media secara mandiri dengan penuh kesadaran.

Di sisi lain, persoalan teknis jumlah liputan yang harus di"setor" jurnalis ke media, terutama apabila jumlah per harinya banyak, akan menjadi beban bagi jurnalis. Jurnalis yang beban liputannya banyak, maka kemungkinan untuk melakukan peliputan mendalam, dan menulis berita-berita isu perdamaian, toleransi, dan keberagaman, akan mengalami kesulitan.

Saran dari hasil penelitian di atas adalah jurnalis dan media lokal di NTT perlu mewaspadai segala kemungkinan pihak-pihak yang ingin memecah belah di wilayah NTT. Bagaimanapun juga potensi masuknya radikalisme dari berbagai penjurur wilayah, melalui Gerakan secara langsung di daerah maupun melalui media internet sangatlah nyata. Selain itu perlu dilakukan Kerjasama berbagai pihak, stakeholder, untuk meningkatkan kompetensi para jurnalis dan awak redaksi, untuk kelbih peka pada isu-isu Gerakan radikalisme, serta memperluat jurnalisisme damai, dengan berbagai pelatihan dan juga kompetisi. Untuk kompetisi tidak hanya ditingkatkan jurnalis, namun juga ditingkatkan media, termasuk memberikan dukungan untuk pogram liputan khusus dan mendalam pada media-media lokal, dengan tema memperkuat keberagaman dan peningkatan toleransi di wilayah NTT.

REFERENSI

- Alexandra, F. (2017). Analisis kajian terorisme dan radikalisme dalam 3 perspektif teoritis. *Jurnal Paradigma*, 6(3), 137–146.
- Altheide, D. L. (2007). The mass media and terrorism. *Discourse & Communication*, 11(2), 287–308.
- Archetti, C. (2012). *Understanding terrorism in the age of global media: A communication approach*.
- As'ad, M. (2018). Rekonstruksi Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus di Kupang). *Al-Qalam*, 11(2), 71–98.
- Banderov, I. I., Simkacheva, M. v, & Shakirov, A. I. (2016). Socio-humanitarian nature of professionalism of the journalist. *Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict*, 20, 111.
- Basyari, I. (2021). *Lawan Konten Radikal di Media Sosial*.
- Beckert, J. (2022). A threat to journalism? How journalists and advertising sales managers in news Organizations perceive and cope with native advertising. *Journalism*.
- Cangara, H. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Galtung, J. (2003). Peace journalism. *Media Asia*, 30(3), 177–180.
- Halverson, J., Goodall, J., & Steven, C. (2011). *Master Narratives of Islamist Extremism*. Springer.
- Hamada, B. Ibrahim. (2021). Determinants of Journalists' Autonomy and Safety: Evidence from the Worlds of Journalism Study. *Journalism Practice*, 1–21.
- Hamayotsu, K. (2013). The limits of civil society in democratic Indonesia: media freedom and religious intolerance. *Hamayotsu, Kikue*, 43(4), 658–677.
- Jamil, S., & Sohal, P. (2021). Reporting under fear and threats: The deadly cost of being a journalist in Pakistan and India. *World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies*, 2, 5–33.
- Juditha, C. (2016). Peace Journalism in News Tolikara Religion Conflict in Tempo. co- Jurnalisme Damai Dalam Berita Konflik Agama Tolikara Di Tempo. co. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 20(2).
- Kusnandar, V. B. (2022). *Sebaran Umat Kristen di NTT, Terbanyak di Timor Tengah Selatan*.
- Lynch, J. (2015). Theoretical and methodological developments. *Global Media and Communication*, 11(3).
- Massey, O. (2011). A proposed model for the analysis and interpretation of focus groups in evaluation research. *Evaluation and Program Planning*, 34(1), 21–28.
- Nurhajati, L., Artini, & Wijayanto, X. A. (2018). *Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia, Penelitian Dewan Pers*.
- Nurhajati, L., & Wijayanto, X. A. (2022). Inovasi Bisnis Model Industri Media Online di Indonesia. Dalam Eni Maryani, Pandan Yudhapramesti, dan Lestari Nurhajati (penyunting), *Idealisme Jurnalis & Inovasi Model Bisnis Industri Media*. Penerbit LP3M LSPR.
- Nyarko, J., & Akpojivi, U. (2017). Intimidation, assault, and violence against media practitioners in Ghana: Considering provocation. *Sage Open*, 7(1).
- Patton, M. Q. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage publications.
- Ravenscroft, I. (2019). Terrorism, religion and self-control: An unexpected connection between conservative religious commitment and terrorist efficacy. *Terrorism and Political Violence*, 32(8), 1819–1834.
- Ritonga, R. (2021). Rontoknya independensi pers cetak dan online di Kota Medan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 26–39.

- Riyanta, S. (2022). *Menguatnya Radikalisme Di Kalangan Generasi Muda dan Perempuan*. RoteNdao. (n.d.). *Daily Archives: Februari 18, 2015*.
- Rustandi, R., & Muchtar, K. (2020). Analisis Framing Kontra Narasi Terorisme dan Radikalisme di Media Sosial (Studi Kasus pada Akun dutadama ija bar). *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 9(2), 134–153.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2013). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective*. Routledge.
- Soekowati, G. M. (2018). Pengaruh Pemberitaan Media Masa Pada Kasus Dugaan Korupsi Dan Partisipasi Warga Dalam Menggunakan Hak Pilih Di Pemilu Kada Serentak Di Indonesia. *INJECT*, 3(1).
- Youngblood, S. (2016). *Peace journalism principles and practices: Responsibly reporting conflicts, reconciliation, and solutions*. Routledge. Routledge.
- Zamzamy, A. (2019). Menyoal radikalisme di media digital. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 5(1), 13–29.